MEMPERKUAT
PENGAWASAN PARTISIPATIF

PASCA TAHUN POLITIK 2024





Oleh:
Lollly Suhenty, S.So.s.I., MH.
Anggota Bawaslu Republik Indonesia

Disampaikan pada THE INDONESIAN FORUM Seri 115 yang diselenggarakan
The Indonesian Institute

19 Desember 2024

PRAKTIK PENGAWASAN PARTISIPATIF

Implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

Bawaslu menerbitkan SK Ketua Bawaslu Nomor 204 Tahun 2024 tentang pedoman. Strategi pengawasan partisipatif. Isinya memuat 4 (empat) level pengawasan partisipatif, yakni terlatih, terbentuk, berfungsi, bergerak.

Pelaksanaan Program

1) ***Level terlatih***
2) ***Level terbentuk*** *(masyarakat membentuk komunitas pengawasan partisipatif)*

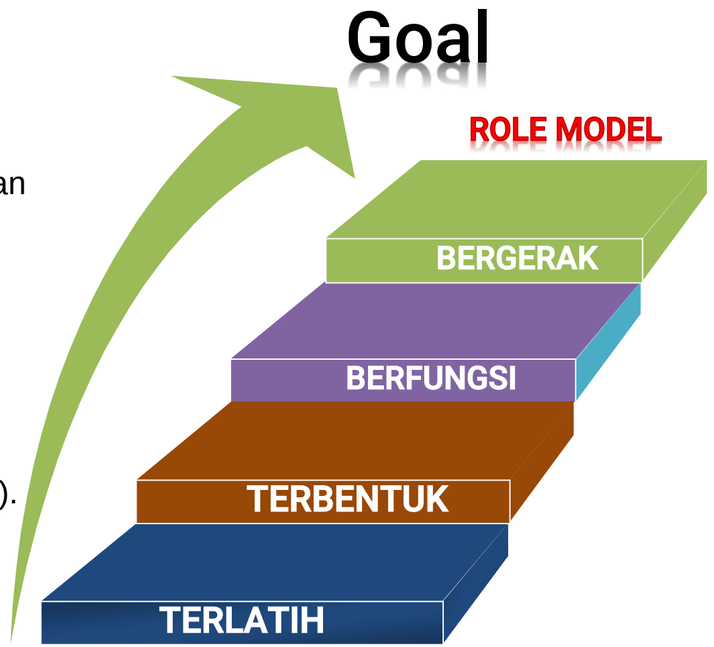
Pengembangan Program

3) Level berfungsi (melaksanakan fungsinya untuk melakukan penguatan wacana/gagasan dan jaringan sosial.

a) Edukasi/diskusi aktif tentang kepemiluan;
b) mengidentifikasi kerawanan dan menawarkan penyelesaian masalah;
c) melakukan konsolidasi jaringan;
d) mengampanyekan gagasan; dan/atau
e) memiliki agenda pemantauan Pemilu/Pemilihan

4) Level bergerak (melaksanakan penguatan wacana/gagasan dan jaringan serta aksi nyata).

a) pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan;
b) melakukan konferensi pers/ menyampaikan siaran pers hasil pemantauan;
c) melakukan riset kepemiluan;
d) menyampaikan informasi/laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu;
e) Melakukan pendampingan komunitas;
f) Melakukan pengembangan dan/atau pemberdayaan komunitas; dan/atau
g) Menjadi rujukan (*role model*) pengawasan partisipatif bagi wilayah lain.



PRAKTIK PENGAWASAN PARTISIPATIF

Implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

Capaian Program Partisipasi Masyarakat (Pengawasan Partisipatif) dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan

Bentuk Pencegahan	Aktivitas Pencegahan selama Pemilu	%
Pendidikan	3.043	2%
Partisipasi Masyarakat	**3.767**	**3%**
Kerja Sama	6.102	4%
Naskah Dinas	30.998	21%
Publikasi	11.010	7%
Identifikasi Kerawanan	39.253	27%
Kegiatan Lainnya	53.773	36%
Total	147.946	100%

Bentuk Pencegahan	Aktivitas Pencegahan Selama Pemilihan	%
Pendidikan	1.603	2%
Partisipasi Masyarakat	**3.064**	**4%**
Kerjasama	3.384	5%
Naskah Dinas	20.711	28%
Publikasi	3.775	5%
Identifikasi Kerawanan	19.785	27%
Kegiatan Lainnya	20.651	28%
Total	72.973	100%

- Program Parmas selama pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diuplaod ke https://formpencegahan.bawaslu.go.id sebanyak **6.831 kegiatan**, yang terdiri dari 3.767 pada pengawasan Pemilu dan 3.064 pada pengawasan Pemilihan. *update 18/12/2024.*

- Prosentase program pengawasan partisipatif **3-4 %** dari total bentuk pencegahan. Hampir semua jenis kegiatannya berbasis anggaran dan melibatkan banyak pihak.

- Program pengawasan partisipatif:
  - pendidikan pengawasan partisipatif,
  - forum warga (sosialisasi pengawasan partisipatif),
  - kampung pengawasan partisipatif,
  - pojok pengawasan,
  - kerja sama dengan perguruan tinggi, dan
  - komunitas digital pengawasan partisipatif (Perbawaslu No. 2/2023),
  - akreditasi dan konsolidasi pemantau (Perbawaslu No. 1/2024).

Sumber: https://formpencegahan.bawaslu.go.id

PRAKTIK PENGAWASAN PARTISIPATIF

Implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

Capaian Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan

No	Pengembangan Pengawasan Partisipatif	Jumlah	Provinsi yang Mengembangkan	% terhadap seluruh provinsi	Provinsi Teraktif
1	Kader pengawas partisipatif yang masih aktif	19.788	38	100%	Jawa Tengah (6.807), Jawa Barat (2.330), DI Yogyakarta (1.881), Lampung (1.322), Sulawesi Tenggara (770), Jawa Timur (706)
2	Komunitas kader	299	35	92%	Jawa Tengah (60), Sumatera Utara (35), Aceh (27), Sulawesi Utara (24), Nusa Tenggara Timur (17)
3	Forum Warga Periode 2022-2024	8.928	38	100%	Jawa Tengah (4.092), Jawa Barat (781), DI Yogyakarta (612), Kalimantan Timur (608), Banten (396)
4	Pojok pengawasan luar ruang (didirikan di luar kantor pengawas Pemilihan)	647	22	58%	Jawa Tengah (249), Kalimantan Barat (181), Jawa Timur (41), Nusa Tenggara Timur (27), Kep. Bangka Belitung (26)
5	Kampung pengawasan partisipatif yang didirikan dan/atau masih aktif di provinsi periode 2022?-2024	1.112	36	95%	Jawa Tengah (556), Sulawesi Utara (79), Sumatera Barat (72), Sulawesi Selatan (55), Jawa Timur (52)
6	Perguruan tinggi yang telah dilakukan kerja sama (MoU/PKS) periode 2022 – 2024	1.094	37	97%	Jawa Tengah (192), Jawa Timur (178), Jawa Barat (131), Gorontalo (60), Kalimantan Selatan (53)
7	KKN tematik yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut pengawasan partisipatif	263	21	55%	Jawa Timur (100), Jawa Barat (33), Jawa Tengah (26), Sumatera Utara (26), Kalimantan Utara (26)
Total		**32.131**	**32**	**85%**	**Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung**

Program pengawasan partisipatif secara umum sudah berada level berfungsi menuju level bergerak.

- Program yang Sudah berfungsi dengan baik adalah Pendidikan pengawasan partisipatif, kampung pengawasan partisipatif, dan kerja sama dengan perguruan tinggi.

- Forum warga dan pojok pengawasan baru sebagian besar baru terlatih belum masuk pada level berfungsi. Forum warga sudah banyak dilakukan, namun belum banyak pendampingan komunitas setelah kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga mayoritas sudah terlatih tetapi belum berfungsi.

PRAKTIK PENGAWASAN PARTISIPATIF

Implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif Jarimu Awasi Pemilu

- Pengguna Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/ sebanyak 353 pengguna (18 Desember 2024).
- Pada Pilkada, jumlah kenaikan pengguna mengalami dan jumlah percakapan mengalami pelambatan. Tahapan Pilkada yang cepat membuat Bawaslu terkonsentrasi kepada pengawasan tahapan dan kurang fokus melakukan perawatan dan pengelolaan forum diskusi di Komunitas Digital “Jarimu Awasi Pemilu”



PRAKTIK PENGAWASAN PARTISIPATIF

Implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

Komunitas Kader:

- Jumlah komunitas kader pengawas partisipatif sebagai tindak lanjut kader dalam mengikuti Pendidikan Pengawas Partisipatif dari 35 Provinsi yang memiliki komunitas kader
- Fokus Komunitas kader
  - pengawasan Pemilu/Pemilihan: a) relawan digital/ patroli pengawasan siber, b) Saka Adyasta Pemilu, c) komunitas kader pengawas partisipatif, d) lembaga pemantau, dan e) membentuk cabang lembaga pemantau yang sudah ada.
  - penguatan literasi kepemiluan, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat: membentuk komunitas yang fokus pada isu perempuan, masyarakat adat, seni, desa anti politik uang, konten kreasi), dan forum diskusi.

Pojok Pengawasan Luar Ruang

- tempat pendidikan (perguruan tinggi, sekolah)
- kantor pemerintah (kantor kecamatan, perpustakaan daerah, GOR, kantor desa dan kantor dinas)
- kantor unit Kesehatan (Puskesmas, rumah sakit)
- kantor organisasi kemasyarakatan (Ormas keagamaan, komunitas adat)
- tempat ekonomi dan sosial masyarakat (café, hotel, rumah adat, lokasi wisata, stand pameran)

Kampung Pengawasan Partisipatif

- berfungsi mengedukasi dan mencegah dugaan pelanggaran
- memperkuat demokrasi lokal di tingkat desa, (pendamingan program kampung pengawasan partisipatif)
- mengembangkan komunitasnya secara mandiri.

Inovasi Kerja sama dengan Perguruan Tinggi

inovasi kegiatan di luar yang telah ditentukan, di antaranya kerja sama dengan kampus melakukan hal hal sebagai berikut.

- kolaborasi sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Ngampus (Goes To Campus, Goes To School, sosialisasi pengawasan keliling, Bawaslu Mengajar, Bawaslu Studen Camp, dan lain lain).
- kolaborasi pembuatan konten edukasi.
- pemantauan Pemilu/Pemilihan (kawal hak pilih, *cyber troops*).
- kolaborasi kegiatan (festival/deklarasi/gebyar pengawasan, Bawaslu Car Free Day).
- kolaborasi penyusunan kebijakan (ToT Modul Pengawasan Partisipatif, penulisan jurnal).

TANTANGAN DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

TANTANGAN

Forum Warga
Pertama, lemahnya politik kebijakan dalam penguatan partisipasi warga melalui forum warga. *Kedua*, keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan forum warga.

Pojok Pengawasan Luar Ruang
Keterbatasan regulasi terkait pemindahan barang barang kantor (barang milik negara) yang ke luar kantor
Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengembangan pojok pengawasan luar ruang.

KKN Tematik:
Belum ada SOP KKN tematik secara detail sehingga pelaksanaannya berbeda beda di setiap wilayah.

Kampung Pengawasan Partisipatif:
Kendala keberlangsungan program, baik jaringan maupun dukungan anggaran di Tengah keterbatasan anggaran Bawaslu dalam pengembangan pengawasan partisipatif.

Komunitas digital pengawasan partisipatif:
Kendala sumber daya manusia untuk mengelola forum diskusi dan inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan registrasi dan diskusi di forum

TANTANGAN DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

REKOMENDASI

1. Menyusun *role model* program pengawasan partisipatif. Setiap provinsi mengusulkan *role modelnya,* yang menjadi indikator setidaknya harus berada padal level berfungsi, dan memiliki aktor penggerak, lebih bagus jika ada penyelenggara/kader pengawas partisipatif yang menjadi aktor penggerak.

2. Bekerjasama dengan para stakeholder untuk melakukan kolaborasi kegiatan dalam rangka menjaga keberlangsungan program pengawasan yang sudah aktif, sehingga dapat dilakukan penguatan program dengan tidak banyak mengeluarkan anggaran.

3. Mengembangkan ekosistem demokrasi di tingkat lokal, melalui penguatan Pemilihan demokratis di tingkat mahasiswa, pelajar, pemuda, maupun pemilihan kepala desa.

4. Mengembangkan pemberdayaan komunitas (forum warga, kampung pengawasan partisipatif, komunitas kader pengawas partisipatif) di masa non tahapan untuk penguatan demokrasi dan menumbuhkan kesadaran politik menjelang Pemilu tahun 2029.

TERIMA KASIH

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU"

@Bawaslu_RI

BAWASLURI

Bawaslu RI